

ABSTRAK

Pada dasarnya setiap kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan surat-surat yang sah artinya surat-surat yang berhubungan dan menjelaskan tentang kendaraan yang bersangkutan harus merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib. Kendaraan yang tidak dilengkapi surat-surat yang sah dapat dianggap sebagai kendaraan bermotor ilegal dan harus disita sepanjang pemilik kendaraan tidak dapat menunjukkan surat-surat yang sah, sehingga cek fisik kendaraan bermotor merupakan hal yang sangat penting bagi pemilik kendaraan bermotor maupun bagi aparat kepolisian. Permasalahan : 1. Bagaimana pelaksanaan kompetensi petugas registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor saat ini? 2. Kendala-kendala apa yang timbul dalam pelaksanaan kompetensi petugas registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam mengungkap kasus kejahatan dan cara mengatasinya? 3. Bagaimana seharusnya pelaksanaan kompetensi petugas registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dimasa yang akan datang? Metode Penelitian yang digunakan Metode Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu mengkaji terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan lalu lintas. Hasil penelitian, Pelaksanaan Kompetensi Petugas Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor saat ini. Pelaksanaan sistem registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor sendiri didasari oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 16 Februari tahun 2012 tentang Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Ada beberapa Tahapan atau prosedur yang harus dilalui dalam pelaksanaan Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor oleh petugas, yang termuat dalam Keputusan kepala korps lalu lintas polri nomor: Kep/72/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Standar oprasional prosedur (SOP) Bidang Registrasi dan Identifikasi. Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan kompetensi petugas registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam mengungkap kasus kejahatan dan cara mengatasinya. Pelaksanaan kompetensi petugas registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dilapangan masih banyak kendala antara lain: a. Terbatasnya jumlah personil. Menurut Penata Administrasi II BPKB Subdit Regident, idealnya pelaksanaan dilapangan seharusnya diemban oleh petugas polisi Republik indonesia (Polri) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, karena personil terbatas jadi menggunakan tenaga pegawai harian lepas, dimana pegawai harian lepas tersebut tidak kompeten dibidangnya, dan juga gaji Pegawai harian lepas tidak dianggarkan oleh Polri. b. Kurang Maksimal dalam Pelayanan. Belum seluruhnya petugas pelaksana yang ada disamsat memiliki pengetahuan atau kompetensi dibidangnya. c. Prasarana tidak memadai Kurangnya prasarana yang memadai, seperti gedung pengarsiran yang berada di tempat lokasi berbeda.d. Kurangnya kesadaran masyarakat (Faktor ekonomi, inflasi), karena dana juga menghambat sosialisasi ke masyarakat, mobilitasnya kurang. Seharusnya pelaksanaan kompetensi petugas registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dimasa yang akan datang. Polri untuk menunjang kompetensi petugas registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor perlu adanya sertifikasi agar supaya tercapai apa yang diharapkan di masa yang akan datang sebagai pelayan kepada masyarakat, tujuan sertifikasi sangat berguna bagi : Untuk organisasi.Membantu organisasi meyakinkan kepada stakeholder bahwa pelaksanaan tugas organisasi dilaksanakan oleh tenaga-tenaga yang kompeten.

Kata Kunci : Registration Identifikasi, kendaraan bermotor, kejahatan

ABSTRACT

Basically every motor vehicle shall be equipped with letters of legitimate means to letters that relate and explain about the vehicle in question must constitute an official letter issued by the relevant authorities. Vehicles that do not include the letters that can legitimately be regarded as illegal motor vehicle and must be seized along the vehicle owner can not show the letters are legitimate, so that the physical checks of motor vehicles is very important for owners of motor vehicles as well as for police officers. Problems: 1. How is the implementation of workers' competency and identification of motor vehicle registration current? 2. What obstacles that arise in the workers' competency and identification of motor vehicle registration in uncovering cases of crime and how to solve it? 3. How should the implementation of workers' competency registration and identification of motor vehicles in the future? Methods used method of approach used is normative juridical including reviewing the regulations applicable law relating to traffic. The results of the research, Competence Implementation Officer Motor Vehicle Registration and Identification of the moment. Implementation of the system of registration and identification of own vehicle based on the Law of the Republic of Indonesia Number 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation, Government Regulation No. 50 Year 2016 About Tariff of PNBP prevailing at the Indonesian National Police, Police Regulation No. 5 2012 dated February 16 of 2012 on registration and identification of motor vehicles. There are several stages or procedure to be followed in the implementation and registration of motor vehicles by officers, contained in the decree of the head of the corps of traffic polri number: Kep / 72 / XII / 2013 dated December 27, 2013 on the Standard operational procedures (SOP) Field Registration and Identification. The obstacles that arise in the implementation of workers' competency and identification of motor vehicle registration in uncovering cases of crime and how to overcome them. Implementation of registration and identification of workers' competency in the field of motor vehicles are still many obstacles, among others: a. The limited number of personnel. According to stylist Administration II BPKB Subdit Regident, idealnya implementation should field carried by police officers of the Republic of Indonesia (Polri) and the Civil Servants (PNS). However, due to limited personnel so employ casual employees, which the casual employee is not competent in their field, as well as non-permanent employee salaries are not budgeted by the Police. b. Maximum lacking in performance. Has not fully implementing existing officers disamsat have the knowledge or competence in their field. c. Inadequate infrastructure Lack of adequate infrastructure, such as the filing of buildings that are in place berbeda.d location. Lack of public awareness (economic factors, inflation), because the funds also inhibits socialization into the community, less mobility.

Keywords: Registration Identification, Motor Vehicle, Crime